

Nomor : 3998/D.3/03/2021 01 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyusunan *Road Map* Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) Tahun 2021

Yth. **1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga**
2. Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
(Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti *Kick-off Meeting* 100 UKPBJ yang menjadi target untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ level 3 (Proaktif) Tahun 2021 pada tanggal 11 Februari 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Deputi Reformasi Birokrasi, Pengawasan Aparatur dan Akuntabilitas Kementerian PAN RB, serta pertemuan tingkat wilayah yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-23 Februari 2021, kami mohon agar Saudara dapat memberikan dukungan penuh kepada UKPBJ di instansi Saudara untuk mencapai tingkat kematangan level 3 (Proaktif). Kematangan UKPBJ ini merupakan salah satu variabel dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan dalam Reformasi Birokrasi dan juga sebagai salah satu upaya mendukung strategi pencegahan korupsi.

Dukungan awal yang dapat Saudara berikan adalah dengan menugaskan tim peningkatan kapabilitas UKPBJ yang terdiri dari UKPBJ dan beberapa unit kerja terkait, untuk menyusun Peta Jalan (*Road Map*) untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) di tahun 2021. *Road Map* tersebut kami harapkan dapat Saudara tanda tangani sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama. Mengingat pentingnya pencapaian kematangan UKPBJ di instansi Saudara, *Road Map* pencapaian kematangan UKPBJ agar dapat disampaikan melalui tautan yang tersedia pada aplikasi SIMKU (<http://siukpbj.lkpp.go.id>) sebelum tanggal 31 Maret 2021. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi masing-masing pembina wilayah sebagaimana terlampir.

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Robin Asad Suryo

Tembusan :
Kepala LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : iHZJaS
Nomor Tiket : SK202103010010

Lampiran

I. Daftar Instansi

A. Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Perhubungan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Ombudsman Republik Indonesia
5. Badan Siber dan Sandi Negara
6. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
7. Kementerian Kesehatan
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional)
9. Kementerian Perindustrian
10. Komisi Pemberantasan Korupsi
11. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
12. Kementerian Pertahanan
13. Kementerian Agama
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika
15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan

B. Wilayah Sumatera

19. Provinsi Aceh
20. Provinsi Sumatera Barat
21. Provinsi Sumatera Selatan
22. Provinsi Bengkulu
23. Provinsi Kepulauan Riau
24. Provinsi Lampung
25. Kabupaten Pelalawan
26. Kabupaten Kampar
27. Kabupaten Kepulauan Meranti
28. Kota Padang Panjang
29. Kota Sawahlunto
30. Kota Pekanbaru
31. Kabupaten Belitung
32. Kabupaten Solok Selatan
33. Kota Payakumbuh
34. Kota Solok
35. Kabupaten Rokan Hilir
36. Kabupaten Batanghari
37. Kabupaten Bintan
38. Kabupaten Ogan Komering Hilir

C. Wilayah Jawa

39. Provinsi DKI Jakarta

40. Provinsi Banten
41. Kabupaten Bandung Barat
42. Kabupaten Bogor
43. Kabupaten blitar
44. Kabupaten Sidoarjo
45. Kota Kediri
46. Kota Yogyakarta
47. Kabupaten Bekasi
48. Kabupaten Pati
49. Kabupaten Pekalongan
50. Kabupaten Kulon Progo
51. Kabupaten Bandung
52. Kabupaten Situbondo
53. Kota Mojokerto
54. Kabupaten Subang
55. Kabupaten Sukabumi
56. Kota Cirebon
57. Kota Semarang
58. Kabupaten Pasuruan

D. Wilayah Kalimantan dan Bali

59. Provinsi Kalimantan Timur
60. Provinsi Kalimantan Tengah
61. Kota Singkawang
62. Kota Palangka Raya
63. Kota Banjarmasin
64. Kabupaten Kapuas Hulu
65. Kabupaten Balangan
66. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
67. Kabupaten Tabalong
68. Kabupaten Tanah Bumbu
69. Kota Bontang
70. Kota Samarinda
71. Kabupaten Kotabaru
72. Kota Balikpapan
73. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
74. Kota Denpasar
75. Kabupaten Jembrana
76. Kabupaten Klungkung
77. Kabupaten Bangli
78. Kabupaten Tabanan

E. Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

79. Provinsi Nusa Tenggara Barat
80. Provinsi Nusa Tenggara Timur
81. Provinsi Sulawesi Tengah
82. Provinsi Sulawesi Selatan
83. Provinsi Sulawesi Tenggara

84. Provinsi Sulawesi Barat
85. Provinsi Gorontalo
86. Provinsi Maluku Utara
87. Provinsi Maluku
88. Provinsi Papua
89. Provinsi Papua Barat
90. Kabupaten Sidenreng Rappang
91. Kabupaten Maros
92. Kabupaten Konawe Selatan
93. Kabupaten Baggai
94. Kabupaten Bombana
95. Kabupaten Bone Bolango
96. Kota Jayapura
97. Kabupaten Raja Ampat
98. Kabupaten Manokwari

II. Daftar Pembina Wilayah

No	Wilayah	Nara Hubung
1	Kementerian/Lembaga	M Darwis Rambe (0813 7051 5038)
2	Sumatera	Verawaty Simorangkir (0816 1479 849)
3	Jawa	Fatma M Nastiti (0896 5109 5919)
4	Kalimantan dan Bali	Rosi Anindita (0813 1977 9518)
5	Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua	Sugiarso M Saputra (0857 2274 5852)

III. Tautan Dokumen

1. Dokumen *road map* dapat diunduh melalui tautan berikut
https://bit.ly/PaparanNarsum_KOM
2. Dokumen *road map* yang telah ditandatangani mohon dapat dipindai (*scan*) dan berkas diberi nama dengan format:
Road Map 2021-<nama instansi> ; contoh Road Map 2021-Provinsi Aceh
3. Dokumen *road map* selanjutnya diunggah melalui tautan berikut:
 - a. Untuk K/L http://bit.ly/PetaJalan_KL
 - b. Untuk Pemda http://bit.ly/PetaJalan_Pemda

IV. Dokumen Road Map

Nama Instansi :
 Nama Kepala UKPBJ:
 Narahubung Peta Jalan:

NO	Domain	Variabel	Bukti Dukung	Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Target Waktu dan Level Kematangan												Penanggung Jawab/ Pelaksana	Pihak Terkait	Rencana Anggaran	Agenda Prioritas
						Bulan Ke-															
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	Proses	Manajemen Pengadaan	1.SOP Pengadaan Terintegrasi:																		
2			•SOP Perencanaan																		
3			•SOP Persiapan Pengadaan																		
4			•SOP Pemilihan																		
5			•SOP Pelaksanaan Kontrak																		
6			2. Dokumen Pemenuhan Standar LPSE:																		
7			•Standar 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk																		
8			•Standar 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat																		
9			•Standar 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan																		
10			•Standar 11: pengelolaan keamanan server dan jaringan																		
11			•Standar 17: penilaian internal																		
12																					
13					3. Berita Acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan/atau pelaku usaha																
14		Manajemen Penyedia	1.SOP Pengelolaan Penyedia																		
15			2.Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut																		
16			3.Hasil notulensi rapat progress pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia																		
17			1.SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ																		
18			2.Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ																		
19		Manajemen Kinerja	3.Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ																		
20			4.Dokumen standar 15 LPSE : Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan																		
21			1.SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak)																		
22		Manajemen Risiko	2.Dokumen Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan																		
23			3.Dokumen mitigasi risiko pengadaan																		
24	4.Dokumen kode etik pengelola UKPBJ																				
25	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan	1.Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ.																		
26			2.Dokumen Pemenuhan standar LPSE:																		
27			•Standar 1: Kebijakan Layanan																		
28		•Standar 2: Pengorganisasian Layanan																			
29		•Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan																			
30	Tugas/Fungsi Kelembagaan	1.Dokumen regulasi berisi tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya																			
31		2.Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis 10 PBJ dan Engagement Plan 1 dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eksternal (penyedia, APH)																			
32		3.Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket																			
33	SDM	Perencanaan SDM Pengadaan	1.Dokumen Anjab dan ABK untuk personel UKPBJ																		
34			2.Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personel di UKPBJ																		
35			3.Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ																		
36		Pengembangan SDM Pengadaan	1.Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personel UKPBJ																		
37	2.Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ																				
38	3.Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB																				
39	4.Dokumen Standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM																				
40	Sistem Informasi	Sistem Informasi	1.Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh																		
41			2.Dokumen pemenuhan standar LPSE:																		
42			•Standar 3: Pengelolaan Aset Layanan																		
43			•Standar 6: Pengelolaan Perubahan																		
44			•Standar 7: Pengelolaan Kapasitas																		
45			•Standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan																		
46			•Standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan																		
			•Standar 16: Pengelolaan Kepatuhan																		

Mengetahui,
 Sekretaris Jendral, Sekretaris Utama, Sekretaris Daerah